

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN *CARBON EMISSION DISCLOSURE* TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEBERLANJUTAN (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR MARITIM DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021–2024)

Zeynep Aslan ^{1*)}; Meutia Riany ²⁾

- 1). Fakultas Bisnis hukum dan pendidikan, Universitas Nusa Putra
email: zeynep.aslan_ak23@nusaputra.ac.id
- 2). Fakultas Bisnis hukum dan pendidikan, Universitas Nusa Putra
email: meutia.riany@nusaputra.ac.id

*Corresponding email: zeynep.aslan_ak23@nusaputra.ac.id

Abstract

This study aims to empirically examine and analyze the partial and simultaneous effects of corporate governance and Carbon Emission Disclosure on the quality of sustainability reporting. This study uses a quantitative approach with a causal research design. The population in this study consists of maritime and logistics companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. Based on the sample selection criteria, 17 companies were obtained as research samples with a total of 68 observations. Data analysis used panel data regression, where the most consistent and appropriate model used was the Common Effect Model (CEM). The results show that corporate governance partially has no significant effect on the quality of sustainability reporting. On the contrary, Carbon Emission Disclosure is convincingly proven to have a positive and significant effect on improving the quality of sustainability reporting. Furthermore, simultaneous testing proves that the integration between corporate governance structure and transparency of Carbon Emission Disclosure is simultaneously able to provide a significant effect on the quality of sustainability reporting. The synergy of these two elements creates a highly effective dual control ecosystem in validating the push of Legitimacy Theory, even though current internal oversight mechanisms tend to still be oriented toward administrative compliance and financial targets alone.

Keyword:

Sustainability Reporting Quality, Corporate Governance, Carbon Emission Disclosure, Legitimacy Theory, Maritime and Logistics Sector.

PENDAHULUAN

Kualitas pelaporan keberlanjutan kini telah menjadi fokus utama dalam praktik bisnis modern (Gamar & Widoretno, 2024). Laporan keberlanjutan tidak lagi dipandang sekadar pelengkap dokumen perusahaan, melainkan sebagai instrumen penting untuk membuktikan transparansi dan komitmen entitas terhadap aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola. Laporan *Survey of Sustainability Reporting 2024* yang dirilis oleh (KPMG, 2024) membuktikan bahwa sebanyak 96 persen perusahaan kategori Global 250 dan 79 persen perusahaan N100 secara konsisten telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Survei tersebut juga mencatat bahwa sebagian besar dari perusahaan tersebut sudah menetapkan target pengurangan emisi karbon dengan merujuk pada standar global *Global Reporting Initiative (GRI)*. Fakta ini menegaskan bahwa paradigma dunia usaha telah bergeser untuk lebih mengutamakan kelengkapan dan kredibilitas informasi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pelaporan administratif semata.

Praktik pelaporan keberlanjutan ini sangat berkaitan erat dengan Teori Legitimasi yang mempostulatkan bahwa setiap perusahaan terikat oleh kontrak sosial dengan masyarakat di lingkungan tempat mereka beroperasi. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, perusahaan harus menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional mereka sejalan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Salah satu sektor yang memiliki urgensi tinggi terkait hal ini adalah sektor maritim dan logistik (Mulya & Rohman, 2020). Catatan dari *International Maritime Organization* (Breitbarth & Martens, 2024) menunjukkan bahwa volume emisi dari sektor pelayaran menyumbang sekitar 2,89 persen dari total emisi global. Di tingkat nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di Indonesia. Tuntutan transparansi pada sektor ini semakin dipertegas oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan melalui regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta pedoman SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021.

Untuk merespons tingginya tuntutan transparansi tersebut, perusahaan membutuhkan dukungan tata kelola perusahaan yang kuat (A. Fujianti et al., 2025). Mekanisme pengawasan yang ideal, khususnya melalui peran aktif dewan komisaris independen, berfungsi untuk menjamin bahwa laporan keberlanjutan yang dipublikasikan benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan. Pengawasan internal ini akan menekan potensi manipulasi informasi sehingga perusahaan mampu menyajikan laporan yang lebih akuntabel. Argumentasi ini sejalan dengan temuan riset (Fasya et al., 2024) serta (L. Fujianti et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa mekanisme tata kelola berkontribusi positif terhadap keluasan pengungkapan informasi nonkeuangan. Selain itu, (Jaenudin et al., 2025) juga membuktikan bahwa tata kelola perusahaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsistensi pengungkapan emisi karbon entitas bisnis (Astuti Intan Novia et al., 2024).

Selain mekanisme tata kelola, transparansi pengungkapan emisi karbon juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan (Meidhita Alauddin et al., 2025). Ketersediaan informasi yang rinci mengenai volume emisi, sumber polusi, dan strategi mitigasi iklim merupakan wujud nyata dari tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Keterbukaan data karbon ini akan secara langsung memperkaya substansi laporan keberlanjutan secara keseluruhan (Mulya & Rohman, 2020). Logika ini didukung oleh temuan empiris dari (Astuti Intan Novia et al., 2024) serta (Pratiwi et al., 2024) yang menegaskan bahwa pengungkapan emisi karbon memainkan peran penting dalam membentuk persepsi positif publik dan mendorong kualitas pelaporan secara utuh.

Meskipun pengungkapan emisi dan tata kelola memiliki peran yang sangat penting, penelusuran terhadap sejumlah literatur terdahulu masih menemukan adanya celah riset (Nursulistyo et al., 2022). Mayoritas penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pengujian variabel tersebut terhadap nilai valuasi atau kinerja keuangan perusahaan. Riset yang secara spesifik menempatkan kualitas pelaporan keberlanjutan sebagai variabel terikat masih sangat terbatas. Selain itu, objek observasi pada penelitian terdahulu umumnya didominasi oleh sektor pertambangan dan energi, sementara sektor maritim dan logistik belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan emisi karbon secara parsial maupun simultan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Pemilihan rentang waktu pengamatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dilakukan untuk memperluas ketersediaan data guna memperoleh hasil representatif yang dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan literatur akuntansi keberlanjutan pada perusahaan sektor maritim dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Legitimacy Theory

Legitimacy Theory menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat melalui aktivitas yang sesuai dengan nilai, norma, dan harapan sosial (Gamar & Widoretno, 2024). Legitimasi diperoleh ketika masyarakat menilai bahwa aktivitas perusahaan telah berjalan sesuai dengan sistem nilai yang berlaku. Dalam konteks bisnis modern, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (Fasya et al., 2024).

Pelaporan keberlanjutan menjadi salah satu sarana perusahaan untuk mempertahankan legitimasi publik. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk pengungkapan emisi karbon serta praktik tata kelola perusahaan (Nursulistyo et al., 2022). Semakin baik kualitas informasi yang disampaikan, semakin besar peluang perusahaan memperoleh kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat. Oleh karena itu, *Legitimacy Theory* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

Kualitas pelaporan keberlanjutan merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menyajikan informasi keberlanjutan secara relevan, lengkap, transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku (Meidhita Alauddin et al., 2025). Laporan keberlanjutan yang berkualitas tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan telah menerbitkan laporan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana informasi yang diungkapkan mampu menggambarkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan secara memadai.

Dalam penelitian ini, kualitas pelaporan keberlanjutan diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan GRI 2: *General Disclosures*. Pengukuran dilakukan melalui metode *content analysis* dengan pendekatan dikotomi, yaitu skor 1 apabila item diungkapkan dan skor 0 apabila item tidak diungkapkan (Astuti Intan Novia et al., 2024). Semakin banyak item GRI yang diungkapkan perusahaan, semakin tinggi kualitas pelaporan keberlanjutan yang dihasilkan.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan (A. Fujianti et al., 2025). Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diprosesikan melalui Dewan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan pihak manajemen atau pemegang saham pengendali. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan (Mulya & Rohman, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan (L. Fujianti et al., 2024) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *ESG disclosure*.

Carbon Emission Disclosure

Carbon Emission Disclosure merupakan pengungkapan informasi perusahaan mengenai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. Pengungkapan ini mencakup informasi mengenai emisi gas rumah kaca, sumber emisi, intensitas emisi, upaya

pengurangan emisi, serta komitmen perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim (Jaenudin et al., 2025).

Pengungkapan emisi karbon menjadi bagian penting dalam pelaporan keberlanjutan karena mencerminkan transparansi perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Semakin luas pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula komitmen perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawab lingkungan kepada para pemangku kepentingan (Pratiwi et al., 2024). (Astuti Intan Novia et al., 2024) menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga informasi emisi karbon dapat menjadi perhatian penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai perusahaan (A. Fujianti et al., 2025). Selain itu, (Mulya & Rohman, 2020) menemukan bahwa kualitas tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

Dewan Komisaris Independen berperan penting dalam meningkatkan objektivitas pengawasan terhadap manajemen. Mekanisme pengawasan yang independen dapat mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi secara lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif *Legitimacy Theory*, perusahaan yang diawasi dengan baik cenderung berupaya memenuhi harapan pemangku kepentingan melalui keterbukaan informasi, termasuk dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik dewan memiliki keterkaitan dengan pengungkapan informasi non-keuangan. (L. Fujianti et al., 2024) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *ESG disclosure*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin memadai proporsi dewan komisaris independen, semakin terdorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan.

b. Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

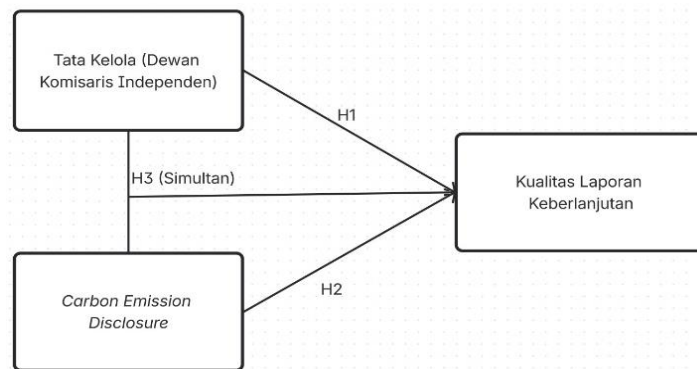
Carbon Emission Disclosure merupakan bentuk keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. Informasi tersebut dapat mencakup jumlah emisi, sumber emisi, intensitas emisi, strategi pengurangan emisi, serta komitmen perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam perspektif *Legitimacy Theory*, perusahaan yang mengungkapkan informasi emisi karbon secara lebih luas menunjukkan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi publik melalui transparansi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan (Meidhita Alauddin et al., 2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon memiliki peran penting dalam penilaian pemangku kepentingan terhadap perusahaan. (Fasya et al., 2024) menemukan bahwa *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor transportasi dan logistik. (L. Fujianti et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dan *green investment* berpengaruh positif terhadap perusahaan (Luthfiani et al., 2026). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa informasi emisi karbon merupakan bagian penting dari transparansi lingkungan. Semakin luas pengungkapan emisi karbon, semakin besar pula kualitas informasi lingkungan yang tercermin dalam laporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan.

c. Pengaruh Tata Kelola (Dewan Komisaris Independen) dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

Dewan Komisaris Independen dan *Carbon Emission Disclosure* merupakan elemen-elemen yang saling melengkapi dalam mendorong terciptanya kualitas pelaporan keberlanjutan yang tinggi. Struktur tata kelola (komisaris independen) berperan sebagai mekanisme internal yang memastikan proses pelaporan berjalan secara transparan dan sesuai regulasi, sedangkan *Carbon Emission Disclosure* memberikan substansi informasi lingkungan yang menunjukkan tanggung jawab nyata perusahaan. Dalam perspektif *Legitimacy Theory*, kombinasi instrumen pengawasan dan transparansi isu iklim ini dapat memperkuat upaya perusahaan dalam menjaga legitimasi publik melalui penyajian laporan yang lebih lengkap dan andal. (L. Fujianti et al., 2024) serta (Fasya et al., 2024) sama-sama membuktikan bahwa instrumen tata kelola maupun pengungkapan karbon memainkan peran sentral dalam transparansi operasi entitas bisnis. Dengan demikian, pengawasan tata kelola yang terintegrasi dengan pengungkapan emisi karbon secara bersama-sama diperkirakan mampu mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Dewan Komisaris Independen dan *Carbon Emission Disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian berbentuk angka, rasio, dan skor pengungkapan yang dapat diukur secara objektif. Desain kausalitas digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelaporan Keberlanjutan, sedangkan variabel independennya adalah Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan melalui Dewan Komisaris Independen, serta *Carbon Emission Disclosure*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor maritim dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat 23 perusahaan yang termasuk dalam populasi penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian.

Kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi perusahaan sektor maritim dan logistik yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024, menerbitkan laporan tahunan secara lengkap, menerbitkan laporan keberlanjutan atau

mengungkapkan informasi keberlanjutan yang dapat diakses, menyajikan data Dewan Komisaris Independen, serta mengungkapkan informasi emisi karbon yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel *Carbon Emission Disclosure*. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama empat tahun, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 68 observasi.

Tabel 1. Prosedur pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Total
Perusahaan Sektor maritim dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 - 2024	23
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria kelengkapan data penelitian	(6)
Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian	17
Total observasi penelitian selama periode 2021–2024	68

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor maritim dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai struktur tata kelola perusahaan, pengungkapan emisi karbon, dan kualitas pelaporan keberlanjutan. Sumber data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelaporan Keberlanjutan (KPK). Variabel ini diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan GRI 2: *General Disclosures* yang terdiri atas 30 item pengungkapan, yaitu GRI 2-1 sampai dengan GRI 2-30. Pengukuran dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan dikotomi, yaitu skor 1 diberikan apabila item diungkapkan dan skor 0 diberikan apabila item tidak diungkapkan. Rumus pengukuran Kualitas Pelaporan Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

$$KPK = \left(\frac{\text{Jumlah item GRI 2 yang diungkapkan}}{30} \right) \times 100\%$$

Tabel 2. Indikator Pengukuran Kualitas Pelaporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI 2

Kelompok Pengungkapan	Jumlah Item	Skor
Organisasi dan praktik pelaporan (GRI 2-1 sampai 2-5)	5	0/1
Aktivitas dan pekerja (GRI 2-6 sampai GRI 2-8)	3	0/1
Tata kelola (GRI 2-9 sampai GRI 2-21)	13	0/1
Strategi, kebijakan, dan praktik (GRI 2-22 sampai GRI 2-28)	7	0/1
Keterlibatan pemangku kepentingan (GRI 2-29 sampai GRI 2-30)	2	0/1
Total	30	0/1

Sumber: GRI Standards 2021, diolah peneliti.

Variabel independen pertama adalah Tata Kelola Perusahaan. Dalam penelitian ini, Tata Kelola Perusahaan diproksikan melalui Dewan Komisaris Independen (DKI). Dewan Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris. Semakin besar proporsi Dewan Komisaris Independen, maka semakin kuat mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam mendukung transparansi pelaporan. Rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Variabel independen berikutnya adalah *Carbon Emission Disclosure (CED)*. Variabel ini diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan GRI 305: *Emissions*. Pengukuran dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan dikotomi, yaitu skor 1 diberikan apabila item diungkapkan dan skor 0 diberikan apabila item tidak diungkapkan. Rumus pengukuran *Carbon Emission Disclosure* adalah sebagai berikut:

$$CED = \frac{\text{Jumlah item emisi karbon yang diungkapkan}}{5} \times 100\%$$

Tabel 3. Indikator Pengukuran *Carbon Emission Disclosure* Berdasarkan GRI 305

Kode GRI	Item Pengungkapan	Skor
GRI 305-1	Emisi GRK langsung atau <i>Scope 1</i>	0/1
GRI 305-2	Emisi GRK tidak langsung dari energi atau <i>Scope 2</i>	0/1
GRI 305-3	Emisi GRK tidak langsung lainnya atau <i>Scope 3</i>	0/1
GRI 305-4	Intensitas emisi GRK	0/1
GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK	0/1

Sumber: GRI Standards 2016, diolah peneliti.

Secara ringkas, operasional variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perhitungan tiap variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
KPK	Tingkat kelengkapan informasi keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan berdasarkan GRI 2	Jumlah item GRI 2 yang diungkapkan / 30 × 100%	Rasio
DKI	Proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris	Jumlah komisaris independen / total dewan komisaris × 100%	Rasio
CED	Tingkat pengungkapan informasi emisi karbon perusahaan berdasarkan GRI 305	Jumlah item GRI 305 yang diungkapkan / 5 × 100%	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Regresi data panel digunakan karena data penelitian merupakan gabungan antara data *cross section* berupa perusahaan sampel dan data *time series* berupa periode pengamatan tahun 2021–2024.

Seluruh tahapan pengolahan data dan pengujian statistik dalam penelitian ini dieksekusi menggunakan bantuan perangkat lunak analisis ekonometrika EViews. Sebelum memasuki tahap pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling layak melalui serangkaian pengujian yang terdiri atas uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk memilih model yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Sementara itu, uji Lagrange Multiplier difungsikan untuk memvalidasi pilihan model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Model estimasi yang pada akhirnya terpilih dari ketiga pengujian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengujian regresi data panel.

Adapun persamaan matematis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KPK=\alpha + \beta 1DKI + \beta 2CED + e \tag{4}$$

Keterangan:

KPK = Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

DKI = Dewan Komisaris Independen

CED = *Carbon Emission Disclosure*

e = *Error term*

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial dan uji simultan. Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Dewan Komisaris Independen dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan. Sementara itu, uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen dan *Carbon Emission Disclosure* secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan. Selain itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sampel dan Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan objek observasi berupa perusahaan sektor maritim dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Berdasarkan teknik penarikan sampel bersyarat, diperoleh 17 perusahaan yang secara konsisten memenuhi kriteria kelayakan data. Dengan masa pengamatan selama 4 tahun, total unit observasi yang diolah mencapai 68 titik data. Karakteristik dari masing masing variabel penelitian disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif				
Variabel	Min	Maks	Rataan hitung	Standar deviasi
Kualitas pelaporan keberlanjutan	46,67	90,00	68,12	10,18
Tata Kelola Perusahaan	33,33	50,00	36,45	6,72
Pengungkapan Emisi Karbon	0,00	100,00	23,75	30,30

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 5 diatas, kualitas pelaporan keberlanjutan, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan emisi karbon memiliki sebaran data yang cukup bervariasi. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan strategis diantara perusahaan sampel dalam merespons tekanan lingkungan dan regulasi keberlanjutan.

Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti telah melakukan tiga tahapan uji penentuan model estimasi regresi data panel (*Uji chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier*). Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, model yang paling konsisten dan layak

digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM). Model CEM ini juga telah terbukti lolos dari serangkaian uji asumsi klasik, di mana data terdistribusi secara normal, serta terbebas dari gejala *multikolinearitas* dan *heteroskedastisitas*. Ringkasan hasil regresi linier berganda menggunakan model CEM disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel (*Common Effect Model*)

Variabel independen	Koefisien	T hitung	Signifikansi	Keterangan
Konstanta	48,446	3,847	0,0020	-
Tata Kelola	-0,109	1,326	0,1893	Ditolak
CED	0,129	3,850	0,0003	Diterima
Adjusted R Square	0,1628	-	-	-
Probabilitas f statistik	0,0011	-	-	Diterima

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi data panel yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KPK = 48,446 - 0,109DKI + 0,129CED + e.$$

Diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,1628 yang bermakna bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) dan *Carbon Emission Disclosure* (CED) secara bersama-sama mampu menjelaskan 16,28% variasi dari kualitas pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, sisanya sebesar 83,72% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengujian secara serempak menggunakan uji F menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0011, yang nilainya jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil ini memutuskan bahwa Hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti Dewan Komisaris Independen dan pengungkapan emisi karbon secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan sektor maritim dan logistik.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan (H1 Ditolak)

Pengujian secara parsial (uji t) pada Tabel 2 membuktikan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen mencatatkan koefisien regresi sebesar -0,109 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,1893. Karena nilai signifikansi tersebut melampaui batas toleransi 0,05, maka didapatkan keputusan bahwa Hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu memberikan dorongan yang berarti terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan di sektor maritim dan logistik. Mekanisme pengawasan dewan komisaris independen cenderung masih bersifat pemenuhan kepatuhan administratif perusahaan atau sekadar formalitas demi memenuhi regulasi otoritas pasar modal.

Temuan ini memberikan perspektif kritis terhadap *Legitimacy Theory*, di mana perusahaan maritim dan logistik merasa legitimasi utama mereka di mata publik masih bersumber dari stabilitas finansial dan kekuatan operasional, bukan dari kedalaman pelaporan keberlanjutan. Kegagalan fungsi pengawasan lingkungan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Oktavia & Murtanto, 2026) serta (Sari & Marsono, 2013), yang menemukan bahwa tingginya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan karena fokus pengawasan mereka masih didominasi oleh kepentingan kinerja ekonomi semata.

2. Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan (H2 Diterima)

Sebaliknya, pengujian parsial pada variabel *Carbon Emission Disclosure* (CED) mencatatkan koefisien regresi positif sebesar 0,129 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0003. Angka yang berada jauh di bawah nilai kritis 0,05 ini secara meyakinkan memutuskan bahwa Hipotesis kedua (H2) diterima.

Diterimanya hipotesis kedua menegaskan bahwa pengungkapan emisi karbon merupakan motor penggerak utama bagi peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Ketersediaan data perhitungan emisi gas rumah kaca yang presisi membuktikan bahwa entitas bisnis tersebut telah memiliki infrastruktur akuntansi lingkungan yang mapan. Fenomena ini tervalidasi secara sempurna melalui sudut pandang *Legitimacy Theory*, di mana manajemen melakukan pengungkapan karbon secara transparan guna meredam desakan aktivis iklim, memenuhi tuntutan hijau sektor maritim internasional, dan meraih penerimaan sosial (*social license to operate*). Keterbukaan informasi iklim ini bertindak sebagai fondasi kuat yang memperkaya substansi laporan keberlanjutan secara utuh. Logika empiris ini didukung penuh oleh temuan dari (A. Fujianti et al., 2025) dan (Pratiwi et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keterbukaan lingkungan serta nilai intrinsik perusahaan.

3. Pengaruh Simultan Dewan Komisaris Independen dan *Carbon Emission Disclosure* (H3 Diterima)

Diterimanya hipotesis ketiga (H3) membuktikan bahwa perpaduan antara mekanisme pengawasan tata kelola internal dan transparansi metrik lingkungan mampu secara serempak mendikte terciptanya ekosistem pelaporan yang superior.

Meskipun Dewan Komisaris Independen secara parsial belum mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun ketika diintegrasikan dengan keterbukaan data emisi karbon, kedua elemen ini menciptakan sebuah sistem kontrol yang efektif. Struktur tata kelola memberikan landasan formal kepatuhan sistem pelaporan, sementara data emisi gas rumah kaca menyediakan bukti konkret atas komitmen ramah lingkungan entitas.

Kolaborasi inilah yang menyebabkan dorongan *Legitimacy Theory* tervalidasi secara holistik, sehingga memacu perusahaan sektor maritim dan logistik untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih akuntabel dan bermutu. Temuan simultan ini sejalan dengan argumen riset dari (Gamar & Widoretno, 2024) serta (Meidhita Alauddin et al., 2025), yang menyoroti bahwa kombinasi aspek tata kelola dan transparansi karbon secara bersama-sama berfungsi sebagai sinyal (*signalling theory*) yang kuat bagi pasar untuk mempertahankan legitimasi operasi perusahaan jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian empiris dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil merumuskan beberapa simpulan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan sektor maritim dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

Pertama, mekanisme tata kelola perusahaan yang diproksikan melalui Dewan Komisaris Independen secara parsial terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen di dalam struktur perusahaan maritim dan logistik cenderung masih bersifat pemenuhan kepatuhan administratif atau formalitas demi regulasi pasar modal semata. Pengawasan yang dilakukan internal dewan masih berorientasi kuat pada target-target finansial

dan stabilitas ekonomi, sehingga belum mampu memberikan dorongan yang substansial terhadap perluasan pengungkapan aspek nonkeuangan atau isu lingkungan global.

Sebaliknya, pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*) terbukti secara meyakinkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan. Hasil ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai inventarisasi emisi dan strategi mitigasi iklim merupakan motor penggerak utama yang mendorong keandalan serta kedalaman substansi laporan secara utuh. Melalui lensa Teori Legitimasi, kepedulian lingkungan yang ditunjukkan lewat transparansi data karbon ini menjadi instrumen strategis bagi manajemen untuk meredam tekanan dari berbagai pemangku kepentingan sekaligus mengamankan penerimaan sosial dari masyarakat luas demi kelangsungan bisnis jangka panjang.

Lebih lanjut, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa integrasi antara struktur Dewan Komisaris Independen dan pengungkapan emisi karbon secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Meskipun fungsi pengawasan komisaris independen secara mandiri belum optimal dalam mengawal isu keberlanjutan, kehadirannya yang berpadu dengan transparansi data emisi mampu menciptakan sistem kontrol ganda yang efektif. Sinergi inilah yang pada akhirnya memvalidasi dorongan Teori Legitimasi secara holistik, sehingga memacu korporasi sektor maritim dan logistik untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel yang minim dan rentang waktu pengamatan yang singkat akibat ketatnya kriteria seleksi data. Untuk penelitian mendatang, disarankan memodifikasi model dengan menambahkan proksi tata kelola lain seperti komite audit, kepemilikan institusional, manajerial, atau *board diversity*. Peneliti selanjutnya juga diharapkan memperluas cakupan objek ke sub-sektor transportasi atau industri berat lainnya agar diperoleh temuan yang lebih komprehensif, kuat, dan representatif bagi perkembangan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Astuti Intan Novia, Ainul Ridha, & Eliana. (2024). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Breitbarth, T., & Martens, H. (2024). Climate action. In *Encyclopedia of Sport Management, Second Edition* (pp. 146–148). <https://doi.org/10.4337/9781035317189.ch86>
- Fasya, M., Susilowati, R. Y. N., Septiyanti, R., & Kusumawardani, N. (2024). Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* dan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i1.3403>
- Fujianti, A., Nasihin, I., Sujaya, F. A., Akuntansi, P. S., & Perjuangan, U. B. (2025). 1, 2, 3, 8, 2312–2324.
- Fujianti, L., Nelyumna, N., Azizah, W., Astuti, S. B., Hilmiyah, N., & Qodriyah, A. L. (2024). *Good Corporate Governance Dan Environmentalal, Social, Governance Disclosures Di Indonesia*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.28986>
- Gamar, M. F. Al, & Widoretno, A. A. (2024). Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi accounting on the firm value of Indonesia energy companies. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v9i1.y2024.p1-12%0Ahttps://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/39813/199>

- Jaenudin, J., Ruhiyat, E., & Sugiyanto, S. (2025). Factors Affecting *Carbon Emission Disclosure: Good Corporate Governance As a Moderating Variable*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 8(4), 613–631. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i4.6670>
- KPMG. (2024). *The move to mandatory sustainability reporting*. <https://kpmg.com>
- Luthfiani, N. Z., Putri, A., & Meila, K. D. (2026). *Pengaruh Green Investment dan Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Program Studi Akuntansi , Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia , Indonesia Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No . 6*(November 2025).
- Meidhita Alauddin, A. A., Tenriwaru, & Nurafifah Ibrahim, F. (2025). Pengungkapan Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Emisi Karbon Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 7(1), 1176–1195. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.7.1.24713>
- Mulya, F. A., & Rohman, A. (2020). Analisis Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Carbon Emission Discloure. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Nursulistyo, E. D., Aryani, Y. A., & Bandi, B. (2022). The Disclosure of Carbon Emission in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jdab.v10i1.27974>
- Oktavia, R., & Murtanto. (2026). *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan*. 6(2), 29–39.
- Pratiwi, S. M., Suryanti, L., Indrianty, L., & Wanielisa, M. (2024). Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Kinerja Lingkungan dan SR Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Basic Material Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2023). *Ikraith-Ekonomika*, 8(2), 181–191. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i2.4317>
- Sari, M. P. Y., & Marsono. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–10.